

Partisipasi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Agus Suryana

suryaagus2012@gmail.com

IAI Nasional Laa Roiba Bogor

ABSTRACT

This study aims to describe the role and participation of school committees in realizing quality schools. This research is a library research and content analysis (content analysis). This study produced the following findings: 1. Role of Advisory. In carrying out this role, the school committee has the function of providing input and recommendations to education units regarding: (1) educational policies and programs (2). School Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBS), (3). educational unit performance criteria (4). educational staff criteria (5). criteria for educational facilities (6). other matters related to education. 2. Supporting Role (Supporting). This supporting role includes the function of the school committee to do the following: (1). encourage parents and the community to participate in education (2). raise public funds in the framework of financing (3). encourage the growth of public attention and commitment to the implementation of quality education. 3. Controlling Role (Controlling). This controlling role includes the efforts of the school committee in the following: (1). evaluate and supervise program policies, implementation, and educational outputs. 4. Role of Mediator. This mediator role enables the school committee to carry out the following functions: (1). collaborate with the community (2). accommodate and analyze aspirations, ideas, demands, and various educational needs put forward by the community.

Key words: participation, quality, community, school committee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan partisipasi komite sekolah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan dan analisis isi (content analysis). Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: 1. Peran pertimbangan (Advisory). Dalam menjalankan peran ini, komite sekolah memiliki fungsi memberi masukan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan (2). Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), (3). kriteria kinerja satuan pendidikan (4). kriteria tenaga kependidikan (5). kriteria fasilitas pendidikan (6). hal-hal lain terkait dengan pendidikan. 2. Peran Pendukung (Supporting). Peran pendukung ini mencakup fungsi komite sekolah untuk melakukan hal berikut: (1). mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan (2). menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan (3). mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Peran Pengontrol (Controlling). Peran pengontrol ini mencakup upaya komite sekolah dalam hal berikut: (1). melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. 4. Peran Mediator. Peran mediator ini memungkinkan komite sekolah melaksanakan fungsi-fungsi berikut: (1). melakukan kerjasama dengan masyarakat

(2). menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

Kata kunci: partisipasi, mutu, komite sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sarana utama bagi suatu negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan patut memperoleh perhatian utama dalam perbaikan kualitas manusia. Kalau tidak, suatu bangsa akan ketinggalan dengan bangsa lainnya di dunia, lebih-lebih lagi dalam percaturan dunia yang menggunakan teknologi canggih dan serba tanpa batas (*borderless*).

Di negara-negara maju, konsep partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah merupakan tema utama dalam reformasi pengelolaan sekolah di pelbagai sistem pendidikan. Para pembuat kebijakan mulai percaya bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, merupakan keharusan untuk melakukan lompatan dari level pembelajaran kelas ke tingkat organisasi sekolah dan mereformasi sistem struktur serta bentuk manajemen sekolah. Pada saat yang sama, karakteristik sekolah yang efektif (*effective school*) dikembangkan melalui reformasi sekolah yang efektif.

Di Indonesia, salah satu upaya perbaikan mutu pendidikan direalisasikan dengan penerapan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran kewenangan ini berkaitan dengan fokus perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini berarti adanya wewenang yang diberikan kepada hirarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang merupakan ciri penting desentralisasi.

Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, desentralisasi berarti adanya kebijakan dan pola pengambilan keputusan untuk terjadinya pelimpahan wewenang dalam perumusan kebijakan dan penetapan keputusan teknis operasional kepada sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pendidikan untuk ikut serta dalam bertanggung jawab dalam memajukan sekolah. Bentuk nyata upaya pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi adalah dengan menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS ini dikembangkan untuk membangun sekolah yang efektif. MBS menuntut partisipasi lebih besar dari warga sekolah dalam setiap kebijakan dan sepanjang proses pembuatan keputusan sekolah berlangsung, dan semua keputusan dibuat secara kolektif dan sinergis bersama *stakeholders*. Konsep MBS ini juga menuntut para guru, orang tua dan masyarakat mengerti segala kebutuhan terbaik untuk peserta

didik, dan melalui suatu usaha yang kooperatif mereka dapat bekerjasama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Paradigma MBS beranggapan bahwa satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi pendidikan adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan sebagai interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah *stakeholder* pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah atau pun pajak sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat (Budimansyah, 2005:12).

Suatu sekolah bisa dikategorikan sekolah efektif jika memiliki visi dan misi yang dipahami bersama oleh komunitas sekolah, adanya tujuan sekolah yang jelas, dan memiliki kepemimpinan instruksional yang kuat. Sekolah efektif juga harus memiliki iklim belajar yang kondusif sehingga semua siswa bisa berkembang dengan lebih baik. Selain itu sekolah harus menekankan pada proses belajar mengajar dan mendapat dukungan dari orang tua siswa dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas (Suyanto, 1996:1).

Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk Komite Sekolah (KS) pada setiap sekolah dan Dewan Pendidikan (DP) di setiap kabupaten/kota. Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah (KS) sedapat mungkin bisa merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah-sekolah dengan Komite Sekolah, dan interaksi antara para pejabat pendidikan di pemerintah kabupaten/kota dengan Dewan Pendidikan. Bukti tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan diwujudkan dalam fungsi yang melekat pada DP dan KS, yaitu fungsi pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas publik, fungsi pendukung (*supports*), serta fungsi mediator antara sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya.

Kenyataan di lapangan, masih terdapat komite sekolah yang belum sepenuhnya berperan sesuai harapan dan ketentuan yang ada. Komite sekolah yang dibentuk belum memiliki kerangka acuan yang dapat dijadikan rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu komite sekolah belum memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek yang disusun berdasarkan aspirasi orang

tua dan masyarakat, sebagai komponen utama *stakeholder* pendidikan. Tulisan ini berupaya menelaah apa saja partisipasi masyarakat (komite sekolah) dalam mewujudkan sekolah efektif yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Apalagi di era sekolah gratis (terutama di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), partisipasi masyarakat seakan tumpul karena fungsi komite sekolah dipahami sebatas pencari dana dan 'kepanjangan tangan sekolah' dalam mencari dana dari masyarakat dan orang tua. Padahal partisipasi masyarakat yang terwakili dalam komite sekolah tidak hanya berkaitan dengan pencarian dana untuk kepentingan pembelajaran di sekolah, bahkan lebih kompleks dari itu. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah, serta apa saja peran strategis yang bisa dijalankan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Menurut Zulkifi (2015) berkaitan dengan komite sekolah yang ada di Indonesia dapat kita lihat bahwa komite sekolah belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa gejala dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komite sekolah terkesan hanya sekedar papan nama.
2. Komite sekolah hanya pelengkap organisasi.
3. Komite sekolah hanya perpanjangan sekolah atau hanya sebagai alat pengumpul dana dari masyarakat.
4. Komite sekolah hanya melegalisasi konsep yang sudah disusun Kepala Sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan efektivitas sekolah dan mutu sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang berupaya menelaah dari berbagai sumber pustaka, undang-undang dan aturan pendidikan, buku, dan jurnal terkait peran dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Riset kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sekolah Bermutu dan Efektif (*Effective School*)

Efektivitas pendidikan dapat dirumuskan sebagai tingkatan dimana sistem pendidikan dan komponennya serta semua stakeholder mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena itu dalam konteks tujuan dan efek sistem pendidikan diperlihatkan dalam bentuk prestasi, suatu sistem pendidikan yang memberikan kontribusi pada prestasi yang lebih baik (Josip dan Toni, 2016).

Sekolah efektif adalah lembaga yang memiliki tugas agar semua siswa dapat berkembang seoptimal mungkin dalam berbagai aspek dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah yang bersangkutan. Menurut Levin (1995), sekolah efektif setidaknya harus memiliki karakteristik sebagai berikut.

Pertama, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Suasana dan lingkungan sekolah, baik fisik maupun psikologis merupakan prasyarat utama terlaksananya suatu proses belajar-mengajar secara optimal. Iklim sekolah yang kondusif memberikan perlindungan kepada siswa dan warga lainnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan target rencana yang ditetapkan. Oleh karena itu, sekolah efektif haruslah suatu tempat yang menyenangkan, aman, dan tertib sehingga siswa betah belajar dan bersosialisasi dengan warga sekolah lainnya.

Kedua, adanya perumusan visi, misi, dan target mutu yang jelas. Sekolah efektif memiliki visi dan misi lembaga yang akan dicapai secara jelas dan lugas. Visi adalah pandangan masa depan lembaga tentang keberadaan dirinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sedangkan misi merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi.

Ketiga, kepemimpinan sekolah yang kuat. Di sekolah efektif, kepala sekolah mempunyai peran sangat penting dalam mengelola dan menggerakkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan sekolah efektif. Dengan begitu kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengelola sekolah dengan sebaik-baiknya.

Keempat, komunikasi dan dukungan orang tua dan masyarakat. Peran serta dan dukungan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan andil besar bagi perwujudan sekolah efektif. Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk dana saja tetapi yang lebih penting lagi sumbangan pemikiran dan keterlibatan orang tua dan masyarakat sepenuhnya dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.

Sammon (2005:12) menjelaskan bahwa sekolah efektif memiliki faktor-faktor kunci sebagai berikut: (1). Kepemimpinan profesional yang memiliki tujuan

tertentu dan menerapkan pendekatan partisipatif (2). Visi dan tujuan yang konsisten dan terpadu (3). Konsentrasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dengan cara memaksimalkan waktu belajar, penekanan pada aspek akademik, serta fokus terhadap prestasi (4). Senada dengan Sammon, Edmond dalam Syafarudin (2002: 95), memaparkan karakteristik sekolah efektif adalah: (1).Guru-guru memiliki kepemimpinan yang kuat dan kepala sekolah memberikan perhatian tinggi terhadap perbaikan mutu pengajaran (2).Guru-guru memiliki kondisi pengharapan yang tinggi untuk mendukung pencapaian prestasi murid. (3). Iklim sekolah yang tidak kaku, sejuk tanpa tekanan sehingga kondusif bagi proses belajar-mengajar. (4). Sekolah memiliki pengertian yang luas tentang fokus pengajaran dan mengusahakan efektivitas sekolah dengan energi dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pengajaran secara maksimal. (5). Adanya pemantauan atas kemajuan yang diperoleh siswa secara periodik.

Karakteristik sekolah efektif yang lebih rinci diungkapkan oleh Purkey & Smith. Menurut Purkey & Smith dalam Sagala (2007:81), sekolah efektif harus memiliki karakteristik, antara lain: (1). fokus manajemen didasarkan pada sekolah (*school based management*). (2). kepemimpinan instruksional yang kuat (3). stabilitas staf (4). konsensus tujuan (5). pengembangan dan pembinaan staf sekolah (6). dukungan orang tua (7). hasil akademik yang berkualitas (8). penggunaan waktu yang efektif (9). dukungan pemerintah (10). hubungan perencanaan dan kolegikal (11). komitmen organisasi (12). tujuan yang jelas dan harapan yang tinggi di sekolah, dan (13). aturan sekolah yang baik dan kuat.

Senada dengan Purkey, Ornstein dan Levine (Sagala, 2007:81) menjelaskan bahwa karakteristik sekolah efektif adalah: (1). Lingkungan sekolah yang aman dan teratur yang mendukung proses belajar mengajar (2). misi dan komitmen kerjasama staf sekolah yang jelas (3). Karakteristik kepemimpinan instruksional yang lugas dan kuat oleh kepala sekolah (4).iklim yang mendukung bagi murid untuk mencapai keterampilan yang tinggi (5).perencanaan dan pelaksanaan yang dapat memberikan mutu yang terukur terhadap hasil belajar peserta didik (6).melakukan pemantauan atas kemajuan belajar peserta didik dan memperbaiki instruksional dan (7).hubungan sekolah dan keluarga yang positif dan harmonis yaitu orang tua memainkan peranan penting mendukung misi dasar sekolah untuk membantu pencapaian tujuan dan target sekolah.

Menurut Rutter (2002:91), karakteristik sekolah efektif memiliki ciri-ciri yaitu:(1).memiliki etos sekolah yang baik (2).manajemen kelas yang baik (3).harapan guru yang tinggi (4).guru sebagai contoh teladan yang positif (5).umpan balik yang positif dan memberikan perlakuan terhadap siswa (6). koordinasi kerja

yang baik antara guru dan siswa (7).tanggung jawab murid. Dalam ciri-ciri yang dikemukakan, Rutter memberikan penekanan sekolah efektif pada interaksi dan koordinasi kerja sama antara guru dan siswa yang ditopang oleh manajemen kelas, etos dan harapan guru yang tinggi.

Dari sisi perspektif sekolah, menurut Syafarudin (2002:92), ada 3 (tiga) perspektif yang menentukan sekolah efektif, yaitu:

Pertama, organisasi keberadaan sekolah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ada di sekolah adalah efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dukungan staf yang baik, pembiayaan yang cukup, sarana dan fasilitas pengajaran yang baik, dan iklim sekolah yang kondusif, sedangkan faktor eksternal adalah dukungan komite sekolah, dukungan industri, pemerintah, masyarakat dan lingkungan sosial.

Kedua, proses seluruh aktivitas atau interaksi mengajar dan belajar yang bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan. Di dalamnya melibatkan guru yang terampil, kurikulum, kesiapan guru, termasuk sarana mengajar dan belajar.

Ketiga, hasil yaitu prestasi yang dapat diukur. Prestasi inilah yang dikaitkan dengan mutu. Prestasi dapat diketahui dari hasil belajar. Hasil ini tidak berarti hanya mengandalkan prestasi yang dapat diukur saja, akan tetapi hasil yang dapat diketahui dari sikap dan kepribadian pelajar, meskipun agak sukar mengukurnya.

Perspektif yang dikemukakan Syafarudin ini memfokuskan pada persyaratan awal yang harus ada dalam mewujudkan sekolah efektif, termasuk dukungan kepala sekolah, guru, sarana prasarana, iklim sekolah yang kondusif, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Persyaratan awal itu harus diikuti oleh proses belajar-mengajar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan bersama. Persepektif sekolah yang dikemukakan Syafarudin ini lebih menekankan pada kontinuitas suatu alur pengelolaan yang harus dilakukan dalam mewujudkan sekolah efektif.

Dengan demikian sekolah efektif adalah tatanan organisasi sekolah yang dikelola dengan mengoptimalkan segala sumber daya eksternal dan internal organisasi demi mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sekolah efektif juga harus ditopang oleh visi dan misi sekolah, kepemimpinan yang baik, iklim organisasi sekolah yang kondusif, harapan siswa yang tinggi, keterlibatan guru secara aktif, sarana dan prasarana yang memadai serta partisipasi masyarakat atau komite sekolah yang handal dalam upaya mencapai tujuan-tujuan sekolah.

Partisipasi Komite Sekolah

Di era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan sekolah terwadahi dalam suatu badan yang bernama komite sekolah. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.

Partisipasi sendiri bisa dibedakan ke dalam dua bagian yaitu: 1). Partisipasi bebas (spontan dan akibat penyuluhan) dan 2). Partisipasi paksaan sebagai konsekuensi hukum, kondisi sosial ekonomi dan kebiasaan setempat (Davis, 1992:34).

Ada tiga unsur penting dalam definisi tersebut yaitu: unsur keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab. Partisipasi juga mensyaratkan adanya kerja sama dengan banyak pihak. Dalam kerja sama orang harus mengaktualisasikan diri dengan merealisasikan segenap kemampuannya.

Menurut Hamijoyo dalam Wibawa (2002:6) ada beberapa kualifikasi partisipasi yaitu: positif, kreatif, kritis-korektif-konstruktif, dan realistis. Dikatakan positif jika mendukung kelancaran usaha bersama mencapai tujuan yang diinginkan. Kreatif bermakna keterlibatan seseorang selalu dilandasi oleh adanya daya cipta. Partisipasi bersifat kritis-korektif-konstruktif apabila keikutsertaan dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan dan memberikan alternatif yang lebih baik. Partisipasi realistis berarti keterlibatan dengan memperhitungkan kenyataan yang ada.

Partisipasi masyarakat bisa dibedakan ke dalam tipologinya, yaitu partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajat partisipasinya. Partisipasi juga bisa dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, partisipasi mobilisasi, dan partisipasi seremoni (Mulyasa, 2003:170-171). Untuk mencapai partisipasi diperlukan 4 langkah proses yaitu: 1). Partisipasi dalam pengambilan keputusan 2). Partisipasi dalam pelaksanaan 3). Partisipasi dalam memperoleh manfaat/keuntungan 4). Partisipasi dalam mengevaluasi (Nanang, 2003:114).

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sekolah tidak bisa bertindak sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah tanpa melibatkan masyarakat. Apalagi di era otonomi pendidikan, sekolah harus bersinergi dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola proses pembelajaran. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah mencakup hal berikut:

- 1) Orang tua bertindak sebagai guru tamu yang mengajarkan hal-hal khusus yang menjadi keahlian orang tua, sehingga siswa mengenal dan memahami berbagai keahlian dan profesi yang ada.
- 2) Orang tua terlibat dalam penggalangan dana masyarakat untuk kemajuan sekolah.
- 3) Orang tua terlibat dalam aktivitas olahraga dan aktivitas lainnya.
- 4) Orang tua terlibat dalam mengelola fasilitas sekolah. (Gelsthorpe, 2003:149).

Keterlibatan masyarakat, orang tua, guru, dan siswa dalam menciptakan ide, nilai, keyakinan, dan kerangka kerja bersama akan berpengaruh dalam pemberdayaan anggota organisasi secara keseluruhan. Lengkapnya Sergiovani dalam Gelsthorpe (2003:9) mengungkapkan bahwa “ *When individuals (students, teachers, parents) are bound to shared ideas, values, beliefs, and frameworking, bonds of fellowship emerge which empower the membership as a whole.*”

Komite sekolah merupakan salah satu jalur yang ditempuh dalam pengembangan sistem komunikasi dan hal ini merupakan salah satu upaya memberdayakan sekolah dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) pendidikan terlibat langsung dalam memikirkan, membahas, membuat keputusan serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan terkait dengan program-program yang dibuat oleh sekolah (Zulkifli,2015).

Komite sekolah merupakan badan atau lembaga otonom yang dibentuk berdasarkan musyawarah oleh para *stakeholder* atau warga masyarakat di tingkat sekolah sebagai representasi dari lembaga yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan suatu sekolah. Komite sekolah merupakan mitra dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, di antaranya:

1. Sekolah dan masyarakat merupakan suatu kebutuhan dalam menyelenggarakan kependidikan dan pembinaan peserta didik.
2. Sekolah dengan tenaga kependidikannya menyadari pentingnya kerja sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah efektif.
3. Sekolah dan masyarakat sekitar memiliki andil untuk terlibat dalam pendidikan di sekolah, serta mengembangkan berbagai potensi sesuai dengan harapan peserta didik dan masyarakat (Mulyasa, 2003:172).

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, komite sekolah bukan bawahan atau atasan kepala sekolah, tetapi satu sama lain merupakan mitra sejajar dalam mewujudkan pengelolaan sekolah efektif. Dengan demikian komite sekolah harus memiliki kemandirian dalam memerankan kelembagaannya dan tidak terpengaruh

oleh kepentingan-kepentingan individu tertentu yang tidak berkaitan dengan peningkatan kualitas sekolah. Selain itu komite sekolah harus mempunyai standar efisiensi dalam menjalankan manajemen dan penggunaan sumber daya termasuk keuangan sekolah, serta memperhatikan nilai-nilai partisipasi masyarakat dalam menjalankan mutu organisasi.

Komite sekolah juga harus dapat mempertanggung-jawabkan semua kegiatan atau kebijakan, termasuk masalah keuangan kepada masyarakat sekolah dan lembaga terkait lainnya. Pelayanan yang dilakukan komite sekolah harus dilandasi oleh sikap profesional dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari warga sekolah dalam upayanya menerapkan prinsip-prinsip sekolah efektif.

Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu sekolah, komite sekolah memiliki peran-peran strategis yang harus dijalankan oleh tiap anggota komite sekolah. Peran komite sekolah tersebut mencakup.

- 1) Peran Pertimbangan (*Advisory*). Dalam menjalankan peran ini, komite sekolah memiliki fungsi memberi masukan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan (2). RAPBS (3). kriteria kinerja satuan pendidikan (4). kriteria tenaga kependidikan (5). kriteria fasilitas pendidikan (6).hal-hal lain terkait dengan pendidikan. Kegiatan operasional dari fungsi pertimbangan antara lain: (a). mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan masyarakat (b). menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada kepala sekolah. (c). menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis kepada kepala sekolah. (d). memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal (e). memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan. (f). memberi masukan dan pertimbangan kepada kepala sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan kebijakan, dan kegiatan sekolah.
- 2) Pendukung (*Supporting*). Peran pendukung ini mencakup fungsi komite sekolah untuk melakukan hal berikut: (1). mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan (2). menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan (3). mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kegiatan operasional dari fungsi pertimbangan antara lain: (a). mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan

- orang tua dan anggota masyarakat (b). mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri. (c). mengadakan pendekatan kepada masyarakat untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah.
- 3) Pengontrol (*Controlling*). Peran pengontrol ini mencakup upaya komite sekolah dalam hal berikut: (1). melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
 - 4) Mediator . Peran mediator ini memungkinkan komite sekolah melaksanakan fungsi-fungsi berikut: (1). melakukan kerjasama dengan masyarakat (2). menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat (Hasbullah, 2006:97-99).

Dari paparan tersebut bisa ditarik simpulan bahwa partisipasi komite sekolah adalah upaya keterlibatan komite sekolah dalam membuat, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan kebijakan organisasi sekolah, serta berperan dalam memberikan upaya pertimbangan, pendukung, pengontrolan, dan mediasi atas jalannya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

KESIMPULAN

Partisipasi komite sekolah di tengah banyaknya bantuan dana pendidikan dari pemerintah seharusnya bukan malah mengendur atau berkurang, malahan peran tersebut harus lebih dioptimalkan karena berkaitan dengan pertanggung jawaban dan pengawasan dana dari pemerintah atau pun dari masyarakat lainnya. Banyak peran komite sekolah yang belum sepenuhnya dipahami oleh segenap stakeholder sekolah, apalagi dijalankan sepenuhnya, termasuk sebagai: 1) Peran Pertimbangan (*Advisory*), dimana komite sekolah memiliki fungsi memberi masukan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai segala hal berkaitan dengan kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan, 2) Peran Pendukung (*Supporting*), yaitu mencakup fungsi komite sekolah dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, 3) Pengontrol (*Controlling*), peran pengontrol ini mencakup upaya komite sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan, 4) Mediator. Peran mediator ini memungkinkan komite sekolah melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Keempat peran tersebut sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pihak sekolah maupun *stakeholder* lainnya untuk mengabaikan keterlibatan komite sekolah dalam mewujudkan program-program sekolah yang telah disepakati

bersama. Begitu juga prinsip akuntabilitas, transparan, dan independen harus dipegang oleh komite sekolah dalam menjalankan perannya di sekolah sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dari pihak sekolah dan orang tua siswa dengan aktifnya komite sekolah dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah. (2005). "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Info Dikdasmen*, Volume 4. No. 2 November
- Burušić, J., Babarović, T., & Velić, M. Š. (2016). School Effectiveness: An Overview of Conceptual, Methodological and Empirical Foundations. In *School Effectiveness and Educational Management*. Springer International Publishing.
- Davis, Keith, dan John W. Newstrom. (1992). *Perilaku dalam Organisasi*, penerjemah Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Fattah, Nanang. (2003). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Banyu Quraisy.
- Gelsthorpe, Tony dan John West-Burnham.(2003). *Educational Leadership and the Community*, London: Pearson Education.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Dampaknya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Rosda Karya.
- _____. (2003). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies

Vol 3 No 2 (2023) 337-349 P-ISSN 2774-5058 E-ISSN 2775-7269

DOI: 47467/eduinovasi.v3.i2.3639

Sagala, Syaiful (2007). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*
Bandung: Alfabeta.

Syafarudin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep Sistem dan Strategi*, Jakarta:Grasindo.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta:Yayasan Obor.

Zulkifli. (2015). Komite Sekolah di antara Cita dan Realita, *Jurnal Potensia vol.14 Edisi 1*.